

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Tingginya impor daging sapi Australia membuat peternak sapi dalam negeri mengalami kerugian karena konsumen lebih memilih daging sapi impor yang kualitasnya jauh lebih baik dan harganya tidak jauh berbeda. Hal ini menjadi seperti dua mata pedang bagi negara Indonesia. Jika pemerintah Indonesia hanya mengandalkan peternak sapi dalam negeri, maka daging sapi yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Namun apabila impor daging sapi dari Australia dikurangi dikhawatirkan akan memperburuk kerjasama antara Australia dan Indonesia di bidang yang lainnya.

Pemerintah berusaha untuk menetapkan kebijakan agar peternak sapi lokal tidak semakin terpuruk dan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia tetap berjalan dengan baik. Kerjasama IA-CEPA merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalkan masalah yang akan timbul agar hubungan bilateral tetap berjalan lancar dan baik.

Indonesia yang menganut *system country based* dan secara geografis jarak antara dua negara tersebut sangat dekat semakin mempermudah hubungan bilateral. Kebijakan *country based* Indonesia berpengaruh terhadap pemilihan Australia sebagai negara asal impor utama dan swasembada daging 2014 yang berpengaruh terhadap penurunan kuota impor daging sapi Indonesia.

Program Swasembada Daging 2014 yang merupakan salah satu program utama Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga menjadi faktor yang menentukan volume impor sapi Indonesia. Dengan adanya program tersebut pemerintah Indonesia terus berusaha mengurangi volume impor yang tentunya juga berpengaruh terhadap volume impor daging asal Australia. Meskipun program yang sama sebelumnya ditargetkan pada tahun 2005 dan 2010 tidak berhasil mengurangi impor sapi asal Australia tapi justru semakin meningkat,

namun dari data yang didapatkan, sejak tahun 2012 hingga saat ini jumlah impor sapi mengalami penurunan. Sehingga meskipun banyak pihak yang pesimis pada rencana Swasembada Daging 2014 namun hingga saat ini, program tersebut sudah terlihat progressnya meskipun masih belum maksimal.

Berdasarkan data yang ada hingga tahun 2013 dan sistem yang diterapkan Indonesia dalam bidang impor daging sapi, maka ke depannya peluang kerjasama perdagangan dalam hal ini Ekspor Impor daging sapi Australia dan Indonesia masih terbuka lebar. Meskipun dalam bentuk daging, saat ini Australia bukan lagi satu-satunya negara pengspor ke Indonesia namun dari data yang didapatkan Australia masih menjadi urutan pertama sebagai negara asal impor daging Indonesia. Begitupun dalam bentuk sapi Bakalan maupun sapi bibit, Australia hingga saat ini masih menjadi negara satu-satunya asal impor sapi di Indonesia. Selain karena bebas PMK juga karena faktor geografis yang sangat dekat dengan Indonesia.

Ketahanan Pangan dapat terwujud secara domestik murni dengan produksi yang surplus (swasembada, sampai 'swasembada plus'), didukung oleh sistem-sistem keterjangkauan yang handal dan memadai, dan dengan daya beli bangsa yang turut mencukupi agar makanan yang aman, sehat dan cukup banyak mudah dibeli (kalau tidak dihasilkan sendiri) secara terus-menerus. Ketahanan Pangan juga dapat terwujud tanpa suplai domestik yang memadai apabila sumber pangan impor menjadi sumber yang handal dan terjangkau, dan keterjangkauan pun dapat menjadi lebih bagus dengan masuknya bahan pangan impor yang lebih bergizi atau lebih murah atau lebih banyak.

Pada dasarnya, Ketahanan Pangan tidak harus berdasarkan atas pendekatan swasembada ('kemandirian pangan'), ataupun 'kedaulatan pangan', bangsa dapat mencapai status 'tahan pangan' padahal caranya tidak mandiri malah bergantung pada pasar internasional atau interaksi/kerjasama/kemitraan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Ketahanan Pangan dapat membawa kontribusi terhadap kemandirian, tetapi dapat juga merongrong kemandirian, tergantung pada cara mana Ketahanan Pangan tersebut terwujud.

Bagi Australia dan Indonesia, kerjasama di sektor daging sapi berlandaskan prinsip 'gotong royong', maka urusan kemandirian mau tidak mau akan dihambat secara kecil. Tetapi juga, ide kerjasama tersebut tidak sertamerta menghasilkan kebergantungan, dan sepanjang monopoli-monopoli tidak muncul dan sepanjang kerjasama melaksanakan Transfer of Technology (TOT) dan pendidikan serta pelatihan SDM yang berjenjang dan terus menerus dilakukan, maka baik Australia maupun Indonesia tidak akan kehilangan kemandirian, malah seharusnya muncul lebih kuat secara ekonomi dan lebih sehat dan bergizi sebagai bangsa masing-masing. Indonesia belum bisa dikatakan berhasil untuk memproduksi produk lokal daging sapi dengan adanya kerjasama IACEPA, dikarenakan kerjasama ini masih berjalan dalam tahap perundingan belum ada kesepakatan kerjasama IACEPA, dan produk lokal Indonesia pun masih mengalami naik turun.

IV. 2 SARAN

Dari berbagai masalah yang muncul mengenai Daging Sapi baik dari aspek produksi maupun konsumsi umumnya disebabkan oleh harga daging sapi yang semakin meningkat dengan pendapatan masyarakat yang rendah. Berikut beberapa solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut, diantaranya: 1.

1. Membangun rantai pasok nasional. Fenomena kenaikan dan lonjakan harga komoditas, termasuk yang disertai dengan kelangkaan, berulang kali terjadi. Kedua fenomena ini semakin kuat ketika terjadi lonjakan permintaan, misalnya berkaitan hari-hari besar keagamaan. Fenomena yang berulang kali terjadi tersebut semestinya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk merancang suatu program yang bersifat strategis dan sistematis untuk mengantisipasi kelangkaan dan fluktuasi harga berbagai komoditas penting. Langkah-langkah yang bersifat taktis dan operasional, seperti impor, terbukti tidak bisa mengatasi persoalan tersebut. Salah satu upaya pemecahan masalah yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan manajemen rantai pasok (*supply chain management/SCM*). Pemerintah perlu merencanakan, membangun, dan

mengintegrasikan aspek-aspek “produksi-distribusi-konsumsi”, antara lain dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemetaan rantai pasok

Pemetaan dilakukan secara nasional dengan mengidentifikasi parapelaku (pemasok/produsen, pelaku distribusi, pengecer/pedagang, dan konsumen), termasuk wilayah dan aliran distribusinya.

b. Pembuatan basis data

Basis data mencakup: pemasok/produsen (jumlah pemasok, jumlah sapi), pelaku distribusi (jenis dan jumlah pelaku), pengecer/pedagang (jumlah), dan konsumen (jumlah, segmen, tingkat konsumsi, wilayah).

c. Perencanaan rantai pasok.

Dilakukan terutama untuk mengintegrasikan aspek produksi-distribusi-konsumsi yang selama ini saling terpisah. Para peternak pada tingkat produksi, misalnya, “terpisah” dengan pelaku distribusi yang dilakukan oleh pihak lain. Pelaku distribusi dan pedagang pun saling “terpisah”. Hubungan antar pihak terjadi secara transaksional, tanpa ada kerja sama jangka panjang yang memberikan manfaat bagi parapihak. Selain mengakibatkan rantai pasok tidak efisien, kondisi ini membuka peluang pihak tertentu dalam rantai pasok itu untuk mengambil keuntungan secara tidak proporsional.

Perencanaan rantai pasok mencakup pula perencanaan produksi sesuai permintaan/kebutuhan konsumen, termasuk mempertimbangkan peningkatan permintaan berkaitan dengan hari besar keagamaan dan sebagainya.

a. Menata dan membangun produksi

Penataan perlu dilakukan terutama agar produksi dilakukan pada skala ekonomis, mengingat pada saat ini para peternak kebanyakan melakukan penggemukan sapi pada jumlah kecil. Skala ekonomis dapat dicapai dengan mengembangkan peternakan sebagai industri besar atau mengintegrasikan para peternak kecil.

b. Membangun sistem distribusi

Pelaku distribusi sapi potong terdiri dari banyak pihak yang bisa berbeda-beda sesuai daerahnya. Para pelaku distribusi ini antara lain: blantik, jagal, pedagang pengumpul, pedagang besar, rumah potong hewan, dan lain-lain. Sistem distribusi perlu ditata agar efisien dan para pelaku berperan dan mendapatkan keuntungan secara proporsional.

c. Edukasi di tingkat konsumsi

Edukasi diperlukan antara lain agar konsumen melakukan pola pembelian daging secara tepat. Sebagai contoh, pada saat ini masyarakat lebih menyukai membeli daging segar daripada daging beku. Padahal proses pendistribusian sapi potong lebih mahal yang berdampak ke harga daging.

d. Pengembangan infrastruktur dan sarana pengangkutan.

Ketersediaan infrastruktur (pelabuhan khusus ternak, terminal ternak berikut fasilitas bongkar muat, cold storage system untuk cold chain) dan sarana pengangkutan (kapal ternak, kereta api khusus ternak) sangat diperlukan untuk efisiensi proses pengiriman ternak. Untuk pengangkutan sapi dari Jawa Timur ke Jakarta, misalnya, penggunaan kapal ternak berkapasitas 400 ekor jauh lebih efisien daripada menggunakan truk.

e. Pengawasan/pemantauan.

Dilakukan untuk mengantisipasi pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan dengan cara yang tidak dapat dibenarkan. Pengawasan/pemantauan terutama diperlukan pada proses distribusi yang dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan arus pengiriman sapi potong antar wilayah misalnya dengan memanfaatkan jembatan timbang. Di jembatan timbang tidak hanya dilakukan pencatatan berat truk dan muatannya (untuk menghindari beban lebih), namun dilakukan juga pencatatan jumlah sapi potong yang diangkut.

f. Koordinasi antar Instansi.

Pembangunan rantai pasok ini memerlukan koordinasi antarinstansi/lembaga/kementerian, misalnya: Kementerian Peternakan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain. Koordinasi juga diperlukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

2. Peternak Mandiri

Untuk strategi jangka panjang, satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah memperbaiki usaha beternak sapi bagi 6,5 juta peternak berskala kecil. Mereka yang menguasai lebih dari 98 persen populasi sapi di Indonesia harus diajak berbisnis secara benar melalui pendekatan kolektif dengan satu manajemen. Kondisi alam, budaya masyarakat, dan karakter peternak di Indonesia memungkinkan hal itu. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan yang digunakan peternak Australia yang harus bersifat individualis karena kondisi alam, budaya masyarakat, dan karakter peternaknya memang berbeda dengan Indonesia.

Selama ini peternak kecil hanya diajari secara teknis. Itu pun bersifat parsial dan tak berkelanjutan. Jumlah peternak yang diajari juga sangat terbatas dan lokasinya menyebar. Celakanya lagi banyak pihak mengajari mereka dengan pendekatan berbeda-beda. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan tinggi, tetapi tingkat keberhasilan rendah dan produktivitas sapi tetap rendah.

Dari diskusi lebih lanjut, ternyata para peternak tahu pemerintah selama ini hanya melaksanakan proyek dan tidak membina mereka untuk dapat mandiri. Pemerintah di sinibukan hanya Kementerian Pertanian, melainkan juga kementerian lain yang menggunakan ternak sebagai komoditas dalam proyeknya.

Hal itu dapat diartikan bahwa pendekatan proyek yang selama ini berjalan tidak mencerdaskan peternak dan tidak membuat mereka menjadi pengusaha sapi yang berdayasaing. Namun, fakta lain juga menunjukkan bahwa tidak semua proyek pemerintah gagal karena beberapa proyek pemerintah dapat melahirkan peternak baru berjiwa bisnis sebagaimana yang terjadi dalam program Sarjana

Membangun Desa (SMD). Namun, keberhasilan program ini kurang berdampak secara signifikan.

Jadi, yang perlu diupayakan ke depan adalah bahwa peternak harus dapat berbisnis secara mandiri melalui usaha kolektif dengan satu manajemen. Jumlah sapi yang diusahakan harus ada minimalnya, misalnya, 1.000 ekor sapi betina dalam satu kawasan padat sapi. Pemerintah harus memfasilitasi usaha kolektif tersebut, baik dari aspek teknis maupun nonteknis, secara terus-menerus sampai akhirnya usaha itu berjalan mandiri.

Dengan demikian, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan proyek pengadaan sapi, tetapi harus lebih banyak menyelenggarakan aktivitas berkelanjutan yang berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas peternak ataupun memperkuat fasilitas pendukungnya dalam beternak. Untuk jangka pendek, serahkan urusan pemenuhan daging kepada para pelaku bisnis yang memang menguasai pasar dan pemerintah tak perlu ikut bermain di dalamnya. Peran pemerintah sebaiknya tetap sebagai regulator saja.

3. Penetapan kuota impor

Dalam kondisi sekarang, impor sapi bakalan dan impor daging masih tetap diperlukan. Namun kebijakan penetapan kuota impor harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan kebutuhan daging sapi dan kemampuan sapi lokal dalam menyediakan daging sapi. Dengan demikian, maka kebutuhan daging sapi dapat terpenuhi tanpa berdampak menguras populasi ternak sapi potong di Indonesia dan lemabungnya harga daging sapi di pasar domestik.